



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTRISNO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **238619**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.769.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/240 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 412.000.000
2. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 337.000.000
3. Tanah Seluas 183 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 1216 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 217.000.000
5. Tanah Seluas 1216 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 212.000.000
6. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000
7. Tanah Seluas 880 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 137.000.000
8. Tanah Seluas 465 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 202.000.000
9. Tanah Seluas 3553 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 855.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **352.000.000**

1. MOBIL, HONDA HR-V HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000



2. MOTOR, YAMAHA N MAX METIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1,2E CVT CKD Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	278.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.778.574
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.405.778.574
III. HUTANG	Rp.	224.987.034
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.180.791.540

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.